



Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor

Inda Sintya Prastika^{1✉}

¹Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 29 April 2020
Disetujui 1 September 2020

Dipublikasikan 18
September 2020

Keywords:

Disaster, Landslide, Destana

DOI:

<https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201/35473>

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik. Menurut BNPB kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2005-2015 adalah 78% (11.648) merupakan bencana hidrometeorologi (BNPB, 2016). Salah satu upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana adalah melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana di desa dengan risiko bencana tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus- September 2019 di Desa Tlogopayung dan Desa Cening Kabupaten Kendal. Hasil menunjukkan bahwa pencapaian untuk Desa Tlogopayung dan Desa Cening adalah legislasi 100%, perencanaan 100% dan 75%, kelembagaan 33% dan 78%, pendanaan 33%, pengembangan kapasitas 60% dan 67% serta penyelenggaraan penanggulangan bencana 25% dan 50%. Simpulan dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan kinerja pada aspek legislasi dan pendanaan, terdapat perbedaan pencapaian pada aspek perencanaan, pendanaan, kelembagaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Destana Tlogopayung dan Destana Cening di Kabupaten Kendal.

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with a high level of disaster risk. According to BNPB, the disasters in Indonesia from 2005-2015 were 78% (11,648) were hydrometeorological disasters (BNPB, 2016). One of the efforts undertaken by BNPB and BPBD in disaster management was through the establishment of a Disaster-Resilient Village. This study to description Landslide Disaster-Resilient Village performance on Kendal. This type of research was quantitative descriptive. The study was conducted in August-September 2019 in Tlogopayung Village and Cening Village Kendal. The results obtained showed that the achievements for Tlogopayung and Cening Villages were 100% legislation, 100% and 75% planning, 33% and 78% institutional, 33% funding, 60% and 67% capacity development and 25% disaster management and 50%. The conclusion in this study is that there is no difference in performance in the aspects of legislation and funding, there are differences in achievement in the aspects of planning, funding, institutional, capacity building and implementation of disaster management in Destana Tlogopayung and Destana Cening in Kendal Regency.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: indasintya@yahoo.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlihat bahwa kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2005-2015 adalah 78% (11.648) merupakan bencana hidrometeorologi, dan 22% merupakan bencana geologi (BNPB, 2016).

Berdasarkan matriks kajian risiko bencana hidrometeorologi yang disusun oleh BNPB tahun 2015, dapat diketahui bahwa pada beberapa bencana, Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur terkait jumlah paparan risiko bencana. Sedangkan untuk jumlah kejadian bencananya, Jawa Tengah selalu menduduki peringkat pertama pada semua bencana selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019. Salah satu bencana yang sering terjadi di Jawa Tengah adalah bencana tanah longsor. Jumlah kejadian tanah longsor di Jawa Tengah merupakan kejadian tanah longsor tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang sering terjadi tanah longsor adalah di Kabupaten Kendal yaitu sebanyak 72 kali kejadian selama 5 tahun terakhir sampai dengan April 2019.

Perubahan iklim baru- baru ini meningkatkan angka kejadian bencana. Seiring banyaknya bencana terjadi, maka semakin besar pula dampak bencana. Menurut penelitian yang dilakukan di India, tanah longsor merupakan salah satu bencana yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi yang menyebabkan kerugian berupa kerusakan property sampai dengan hilangnya nyawa (Bhardwaj, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD adalah melalui pembentukan Kelurahan/Desa Siaga Bencana dan Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana di desa dan kelurahan dengan risiko bencana tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terkait fungsi dan tugas BPBD dan BNPB sebagai badan penyelenggara

penanggulangan bencana daerah dan nasional. Dalam upaya tersebut mengandalkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana. Di Uganda, risiko tanah longsor sangat tinggi terjadi, untuk itu Uganda juga menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yaitu dengan penanaman pohon sebagai pemanfaatan lahan (Mertens, 2018).

Bencana adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor non alam yang dapat mengakibatkan kerugian berupa kehilangan nyawa, kerugian ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya di suatu wilayah tertentu. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, 2017). Menurut BNPB pada Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana tahun 2017 bencana tanah longsor seringnya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, tanah terjal, kurangnya kepadatan tanah, kurangnya tutupan vegetasi serta getaran. Bencana tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan keterbatasan waktu untuk melakukan evakuasi.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejadian bencana tidak mudah diprediksi. Sifat bencana yang tidak pasti dapat menimbulkan kemungkinan kerugian yang lebih besar. Akibat bencana yang terjadi merupakan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Menurut Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, akibat bencana adalah kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya risiko bencana atau menurunnya kapasitas individu masyarakat. Sedangkan dampak yang terjadi akibat bencana adalah berupa dampak ekonomi dan fiskal, dampak sosial budaya dan politik, dampak pembangunan manusia serta dampak lingkungan.

Mengingat begitu banyak dampak dan akibat bencana, maka perlu dilaksanakan penanggulangan bencana. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penanggulangan Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 dibagi menjadi 3 yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan masyarakat terkait kebencanaan yang dilaksanakan secara terorganisir. Mereka menggunakan sumber daya nya sendiri untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa istilah organisasi yang merupakan organisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau komunitas. Ada yang disebut dengan Kampung Siaga Bencana, Kelurahan/Desa Siaga Bencana dan juga Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. Perbedaan dari ketiganya adalah pada lembaga penyelenggaranya, dimana Kampung Siaga Bencana diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI sedangkan Desa/ Kelurahan Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BNPB dan BPDB. Perbedaan dari Desa/ Kelurahan Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh

bencana adalah komponen organisasi yang ada di dalamnya. Desa/ Kelurahan Siaga Bencana terdiri dari tim relawan saja sedangkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari tim relawan dan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) dan dilengkapi dengan fasilitator (Habibullah, 2013). Atau untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.

Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Secara garis besar, desa/kelurahan tangguh bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut: Aspek yang pertama adalah aspek legislasi yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa, aspek kedua adalah perencanaan yaitu penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan). Dalam pelaksanaannya, perencanaan kegiatan cukup penting keberadaannya, untuk itu dokumen perencanaan menurut Ariyani (2016) harus disusun secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilaksanakan oleh Saroji (2016) dokumen perencanaan harus disusun berdasarkan hasil survey dan

Tabel 1. Perbedaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Variabel	Kampung Siaga Bencana	Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
Konsep Desa/ Kelurahan dan Kampung	Kampung hanya sebatas merek dan mengacu pada kelembagaan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/dusun.	konsep yang jelas yaitu mengacu pada devinisi desa sebagai wilayah administratif
Maksud dan Tujuan	Upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas, tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya	Upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas, tujuan cenderung sebagai upaya peningkatan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Organisasi Pelaksana	Membentuk organisasi pelaksana/kelembagaan baru yang dinamakan “Kampung Siaga Bencana”	Dapat membentuk kelembagaan baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang sudah ada
Pelaksana	Perseorangan yaitu relawan (Tagana) dan unsur masyarakat	Perwakilan kelompok siaga bencana atau perseorangan (relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat)
Mitra Masyarakat dan Mitra Organisasi	Lebih cenderung pemerintah sebagai mitra organisasi	Mengutamakan kemitraan dan kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama.
Konteks Ecological	Disebutkan pada ketentuan umum tanpa diatur lebih lanjut yaitu definisi kearifan lokal	Salah satu prinsip desa/kelurahan tangguh bencana yaitu mobilisasi sumber daya lokal
Protokol Intervensidan Deliveri Layanan-Layanan	Terkesan intervensi pemerintah lebih dominan dibanding komunitas lokal itu sendiri mulai dari fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penyiapan sistem peringatan dini lokal, pembuatan lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal, simulasi (gladi bencana) dan apel lokal siaga bencana	Cenderung memberi pedoman langkah-langkah kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah
Populasi Target	Masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan maupun dusun	Masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat desa/kelurahan

observasi yang telah dilaksanakan oleh fasilitator.

Aspek selanjutnya adalah kelembagaan yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan

pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. Terkait dengan kelembagaan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanita (2017) hasil kinerja organisasi yang optimal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengaruh kepemimpinan sebuah organisasi, budaya organisasi yaitu norma atau nilai yang dianut dalam suatu organisasi serta lingkungan kerja

suatu organisasi. Ketika organisasi dalam Destana memiliki kinerja yang bagus, maka upaya penanggulangan bencana akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan melalui aspek kelembagaan adalah peningkatan kualitas kepemimpinan, membentuk budaya organisasi yang baik serta membuat lingkungan organisasi yang mendukung kinerja organisasi Destana. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Syarif (2017) menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi mempengaruhi komitmen organisasi.

Aspek selanjutnya adalah pendanaan yaitu rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan). Pendanaan, selain menghambat keberjalanan program juga akan mempengaruhi motivasi dan produktifitas anggota Destana seperti menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Indriyani (2014) gaji dan tunjangan kesejahteraan mempengaruhi produktifitas kinerja seseorang. Selanjutnya adalah pengembangan kapasitas yaitu pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Dalam meningkatkan pengembangan kapasitas yang masih kurang, beberapa hal dapat dilakukan seperti pada penelitian Oktari (2019) yaitu melibatkan *multistakeholder* dalam mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana contohnya pelibatan Dinas Pariwisata, PMI, Media dan Dunia Usaha. *Multistakeholder* akan membantu pelaksanaan penanggulangan bencana. Bantuan dapat berupa bantuan dana dan bantuan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

Aspek terakhir adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk

tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya adalah terletak pada variabel, tempat dan waktu penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui gambaran kinerja Desa Tangguh Bencana tanah longsor di Desa Cening dan Desa Tlogopayung Kabupaten Kendal Tahun 2019.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kinerja Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Cening dan Tlogopayung Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tlogopayung dan Desa Cening Kabupaten Kendal pada tahun 2019. Variabel dalam penelitian ini adalah aspek-aspek kinerja dalam Desa Tangguh Bencana yaitu Legislasi, Perencanaan, Pendanaan, Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan metode *total sampling* dengan mengambil seluruh anggota Desa Tangguh Bencana di kedua desa tersebut sebanyak 60 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer yang peneliti ambil sendiri dan data sekunder. Analisis data menggunakan perhitungan skor kuesioner dan membandingkannya. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut.

Penentuan kategori pada tiap aspek kinerja yaitu legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara menghitung skor indikator yang sudah dicapai untuk setiap Desa Tangguh Bencana untuk selanjutnya dibandingkan dan dikategorikan. Untuk kategori desa tangguh bencana ini menggunakan penilaian kinerja Deskriptor Level Kinerja (DLK) yang dapat

Tabel 2. Kategori Skor Hasil Kuesioner Desa Tangguh Bencana

Kategori Desa	Rentang Skor
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama	(skor 51-60)
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya	(skor 36-50)
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	(skor 20-35)

dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: Baik (68%-100%), Cukup (34%-67%), dan Kurang (0-33%).

Setelah mengisi kuesioner yang telah ada, maka dapat kita ketahui hasil skor yang diperoleh setiap kelurahan dengan kategori dapat dilihat pada tabel 2.

Dengan kategori tersebut dapat kita ketahui tentang gambaran pencapaian kinerja masing-masing Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tlogopayung merupakan salah satu desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Letaknya kurang lebih 49 km dari Kantor Kabupaten Kendal. Desa Tlogopayung merupakan salah satu dari 3 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal. Jenis Bencana yang ada di Desa Tlogopayung adalah bencana tanah longsor sesuai dengan kondisi geografisnya. Sedangkan desa Cening merupakan desa dengan karakteristik yang sama dengan desa Tlogopayung dengan bencana yang sama dengan Desa Tlogopayung yaitu rawan bencana tanah longsor. Desa Cening terletak di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Letaknya kurang lebih 45 km dari Kantor Kabupaten Kendal. Hasil penelitian terkait kinerja Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal berdasarkan komponen yang ada dalam Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Aspek kinerja Desa Tangguh Bencana yang pertama adalah Legislasi. Dalam aspek legislasi terdapat 3 indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing Desa Tangguh Bencana. Menurut hasil wawancara yang

dilakukan kepada Fasilitator Destana masing-masing desa, didapatkan hasil bahwa kedua desa tersebut sudah memenuhi aspek Legislasi Desa Tangguh Bencana. Kedua Destana yaitu Destana Tlogopayung dan Destana Cening, masing-masing sudah melakukan upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB tingkat desa. Selain itu, kebijakan tersebut juga telah tersusun secara konsultif dan melibatkan pemangku kepentingan termasuk Lurah/Kepala Desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga angka pencapaiannya adalah 100%.

Aspek yang kedua dalam Desa Tangguh Bencana adalah aspek Perencanaan. Menurut Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, indikator dalam aspek perencanaan ada 4. Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan kepada fasilitator tangguh bencana dan sekretaris di masing-masing desa, maka pencapaiannya adalah aspek perencanaan sudah dipenuhi 100% oleh kedua desa tersebut, namun pada studi dokumen yang dilaksanakan di Destana Cening tidak ada data yang menunjukkan bahwa kegiatan rencana penanggulangan bencana masuk ke dalam rencana pembangunan desa. Indikator dalam aspek perencanaan adalah adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana, tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan yang ketiga adalah telah dipadukannya dokumen perencanaan dengan rencana pembangunan desa serta yang terakhir adalah adanya dokumen analisis risiko.

Aspek yang ketiga dalam penilaian Desa Tangguh Bencana adalah aspek Kelembagaan. Aspek kelembagaan memiliki 9 indikator di dalamnya. Hasil dari wawancara dan pengisian kuesioner serta dipadukan dengan observasi dan studi dokumen pada aspek kelembagaan didapatkan hasil bahwa ada perbedaan penerapan antara kedua Destana tersebut. Destana Cening sudah melaksanakan 7 indikator yang ada dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, sedangkan Destana Tlogopayung baru hanya menerapkan 3. Indikator dalam aspek kelembagaan adalah adanya upaya awal untuk membentuk forum PRB, forum PRB

beranggotakan wakil masyarakat termasuk perempuan, serta kelompok rentan dan sudah mulai berfungsi, Forum PRB telah berfungsi aktif dengan program yang diimplementasikan dengan baik, adanya upaya membentuk tim relawan, adanya tim relawan yang telah terbentuk dan memiliki kelengkapan personil serta peralatan, tim relawan telah secara rutin melakukan kegiatan yang terprogram, adanya pembicaraan terkait kerjasama dengan pihak lain, adanya perjanjian kerjasama dengan pihak lain, serta adanya kegiatan PRB yang dilaksanakan dengan kerjasama.

Terkait dengan kelembagaan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanita, (2017) hasil kinerja organisasi yang optimal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengaruh kepemimpinan sebuah organisasi, budaya organisasi yaitu norma atau nilai yang dianut dalam suatu organisasi serta lingkungan kerja suatu organisasi. Ketika organisasi dalam Destana memiliki kinerja yang bagus, maka upaya penanggulangan bencana akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan melalui aspek kelembagaan adalah peningkatan kualitas kepemimpinan, membentuk budaya organisasi yang baik serta membuat lingkungan organisasi yang mendukung kinerja organisasi Destana. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Syarif (2017) menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi mempengaruhi komitmen organisasi.

Aspek yang keempat adalah aspek pendanaan. Menurut hasil pengisian kuesioner dan studi dokumentasi terkait aspek pendanaan kepada bendahara masing-masing Destana, maka di dapatkan hasil masing-masing desa hanya memenuhi 2 poin indikator saja. Dalam aspek pendanaan, peneliti juga melakukan wawancara kepada fasilitator destana. Menurut hasil wawancara dengan fasilitator Tlogopayung, Destana Tlogopayung tidak memiliki dana apapun yang digunakan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana ataupun kegiatan lainnya terkait kebencanaan. Destana Tlogopayung belum mengalokasikan dana khusus yang digunakan dalam kebencanaan

yang berasal dari anggaran desa maupun anggaran lain yang dikumpulkan. Biasanya Destana Tlogopayung mengumpulkan dana ketika terjadi bencana tanah longsor. Warga yang rumahnya terkena dampak longsor akan dicarikan bantuan sukarela berbentuk uang tunai atau makanan dari warga lainnya.

Wawancara terkait pendanaan juga dilakukan kepada fasilitator Desa Cening. Menurut hasil dari wawancara dengan fasilitator, Destana Cening sudah melakukan upaya pengumpulan dan pengalokasian dana khusus yang digunakan untuk tanggap darurat dan kegiatan kebencanaan lainnya. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh destana Cening berasal dari iuran mandiri anggota destana secara sukarela. Iuran dilakukan secara berkala untuk pembiayaan segala bentuk kegiatan Destana. Namun, untuk mekanisme dan pengelolaan dana iuran tersebut belum tercatat secara baik. Upaya dalam pengalokasian dana desa untuk kegiatan tanggap darurat dan kebencanaan sudah dilakukan namun belum ada alokasi dana khusus yang berasal dari desa untuk kegiatan Destana. Dalam poin pendanaan, destana Cening tidak memiliki data atau catatan apapun oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa destana Cening juga belum menerapkan.

Tidak adanya pendanaan yang sesuai menjadikan seluruh kegiatan destana menjadi terhambat. Menurut hasil penelitian, anggota destana masih mengharapkan bantuan dana dari desa ataupun BPBD untuk meningkatkan kinerja destana dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Kaitannya dengan keberjalanan program dengan pendanaan yang ada di Destana, program Destana Tlogopayung kurang berjalan karena kurangnya dana. Pendanaan, selain menghambat keberjalanan program juga akan mempengaruhi motivasi dan produktifitas anggota Destana seperti menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Indriyani (2014) gaji dan tunjangan kesejahteraan mempengaruhi produktifitas kinerja seseorang.

Aspek penilaian kinerja yang kelima adalah pengembangan kapasitas. Dilihat dari

hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh fasilitator masing-masing destana, pengembangan kapasitas yang dilaksanakan destana tanah longsor di Kabupaten Kendal adalah dapat kita lihat perbedaan indikator pada aspek pengembangan kapasitas yang telah dicapai oleh Destana Cening dan Destana Tlogopayung. Destana Tlogopayung sudah memenuhi 9 dari 15 poin penerapan sedangkan Destana Cening telah menerapkan 10 dari 15 poin penerapan. Dalam meningkatkan pengembangan kapasitas yang masih kurang, beberapa hal dapat dilakukan seperti pada penelitian Oktari (2019) yaitu melibatkan *multistakeholder* dalam mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana contohnya pelibatan Dinas Pariwisata, PMI, Media dan Dunia Usaha. *Multistakeholder* akan membantu pelaksanaan penanggulangan bencana. Bantuan dapat berupa bantuan dana dan bantuan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

Aspek keenam dan terakhir dalam penilaian Desa Tangguh Bencana adalah aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penilaian aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana di Destana Tlogopayung dan Destana Cening adalah 75% indikator pada aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana di Destana Tlogopayung belum terpenuhi. Adapun dari keseluruhan indikator yang sudah dipenuhi

adalah upaya pemetaan dan analisis risiko yang selanjutnya telah menjadi dokumen, upaya pembuatan peta dan jalur evakuasi, upaya pembangunan sistem peringatan dini serta adanya kegiatan pembangunan fisik untuk mengurangi risiko bencana. Sedangkan di Destana Cening 50% indikator sudah terpenuhi, dan 50% lainnya belum terpenuhi. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana destana Cening sering kali melakukan pemantauan wilayah atau inspeksi untuk melihat tanda-tanda tanah longsor seperti retakan tanah. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Putra (2017) inspeksi secara baik dan benar dapat mengoptimalkan pelaksanaan program suatu organisasi.

Untuk mempermudah melihat perbandingan kinerja kedua Desa Tangguh Bencana, adalah seperti pada tabel 3.

Dari tabel penilaian Desa Tangguh Bencana diatas dapat kita ketahui perbedaan kinerja Destana Tlogopayung dan Destana Cening. Destana Tlogopayung mencapai kategori baik pada aspek legislasi dan perencanaan, cukup pada aspek pengembangan kapasitas dan kurang pada aspek kelembagaan, pendanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk destana Cening kategori baik pada aspek legislasi, perencanaan, dan kelembagaan, kategori cukup pada aspek

Tabel 3.Penilaian Kinerja Desa Tangguh Bencana

No	Aspek	Jumlah Indikator	Penilaian Kinerja	
			Destana Tlogopayung	Destana Cening
1	Legislasi	3	3 (100%) Baik	3 (100%) Baik
2	Perencanaan	4	4 (100%) Baik	3 (75%) Baik
3	Kelembagaan	9	3 (33%) Kurang	7 (78%) Baik
4	Pendanaan	6	2 (33%) Kurang	2 (33%) Kurang
5	Pengembangan Kapasitas	15	9 (60%) Cukup	10 (67%) Cukup
6	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24	6 (25%) Kurang	12 (50%) Cukup
Skor Destana			27	37
			Desa Tangguh Bencana Pratama	Desa Tangguh Bencana Madya

pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kategori kurang pada aspek pendanaan. Menurut skor indikator yang didapat Destana Tlogopayung masuk dalam Desa Tangguh Bencana Pratama dan Desa Tangguh Bencana Cening masuk dalam Desa Tangguh Bencana Madya berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan observasi serta studi dokumentasi.

PENUTUP

Terdapat 6 aspek yang digunakan dalam penilaian kinerja yaitu legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Terdapat 2 Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal, yaitu Destana Tlogopayung dan Destana Cening; pada aspek legislasi, terdapat 3 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung dan Cening sama-sama 100% dengan kategori baik; pada aspek perencanaan, terdapat 4 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 100% dengan kategori baik dan Destana Cening 75% dengan kategori baik; pada aspek kelembagaan, terdapat 9 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 33% dengan kategori kurang dan Destana Cening 78% dengan kategori baik; pada aspek pendanaan, terdapat 6 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung dan Cening sama-sama 33% dengan kategori kurang; pada aspek pengembangan kapasitas, terdapat 15 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 60% dengan kategori cukup dan Destana Cening 67% dengan kategori cukup; pada aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat 24 indikator dengan pencapaian Destana Tlogopayung 25% dengan kategori kurang dan Destana Cening 50% dengan kategori cukup. Dalam penggolongan desa tangguh bencana berdasarkan skor pencapaian, maka Desa Tangguh Bencana Tlogopayung termasuk dalam Desa Tangguh Bencana

Pratama dengan skor 27 dan Desa Tangguh Bencana Cening masuk dalam kategori Desa Tangguh Bencana Madya dengan skor 37.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya data pendukung terkait catatan bukti penelitian. Hal ini terjadi karena minimnya pencatatan yang dilaksanakan oleh anggota Destana sehingga kegiatan destana kurang terdokumentasi dengan baik. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat melakukan pengambilan data dengan jangka waktu yang lebih lama atau melakukan pengambilan data secara kualitatif dengan pemantauan kegiatan sehingga dapat melakukan dokumentasi kegiatan secara langsung untuk menunjukkan bukti kegiatan destana demi memperkuat data penelitian. Selain itu, pengambilan data dapat dilakukan ketika destana melakukan kegiatan khusus dan peneliti dapat ikut serta secara langsung dalam penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan mencari faktor yang mempengaruhi kurangnya pencapaian indikator dalam aspek kinerja desa tangguh bencana, sehingga faktor tersebut dalam dijelaskan secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Dirhamsyah, Nizamuddin. 2016. Kajian Pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Gampong Payatieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*. 3(4): 127-133.
- Bhardwaj, A., Wasson, R.J., Ziegler, A.D., Alan, Chow, W.T.L., Sundriyal, Y.P. 2019. Characteristics of Rain- Induced Landslides in the Indian Himalaya: A Case Study of the Mandakini Catchment During the 2013 Flood. *Geomorphology Journal*, 330: 100-115.
- BNPB. 2016. *Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. 2017. *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
- Habibullah. 2013. Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga

- Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. *Jurnal Informasi*, 18(2):133–150.
- Indriyani, A. 2014. Analisis Pengaruh Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Operation Department PT. Export Leaf Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 12(1): 41-56.
- Mertens, K., Jacobs, L., Maes, J., Poesen, J., Kervyn, M., Vranken, L. 2018. Disaster Risk Reduction Among Household Exposed to Landslide Hazard: A Crucial Role for Self-Efficace. *Land Use Policy Journal*, 75: 77-91.
- Oktari, R. S. 2019. Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2):189–197.
- Putra, D. P. 2017. Penerapan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 1(3):73–83.
- Saroji, Mahdi, S., Srimulyani, E. 2016. Kajian Empiris Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Terhadap Ketangguhan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus di Dua Gampong Pesisir Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 3(4): 142-148.
- Syarief, A. 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi dan Perilaku Kewargaan Organisasi. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 8(3): 173–188.
- Yanita, P. 2017. Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 2(2): 150–156.